

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN TATA NIAGA BERAS DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI  
(Studi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan  
Tahun 2017)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
WIDIA NOVITA LUKITASARI.WA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN TATA NIAGA BERAS DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI (Studi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017)**

**Oleh  
WIDIA NOVITA LUKITASARI.WA**

Kebijakan tata niaga beras di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dengan berbagai strategi turunannya belum dapat dilaksanakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 antara lain kejelasan tujuan program, sasaran program dan unit kerja sudah efektif sesuai dengan Teori Efektivitas Kebijakan dari Dunn (2003:610). Sedangkan faktor penghambat efektivitas kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan adalah kejelasan strategi pencapaian tujuan program belum efektif dan belum ada tindak lanjutnya, perumusan kebijakan program yang belum mantap dan kurang berpihak pada petani, penyusunan program yang kurang tepat dan perlu penyempurnaan, penyediaan sarana dan prasarana kurang lengkap dan jikapun ada masih minim, operasional program belum efektif, masih banyak kendala dan kekurangannya, fungsional program belum efektif dilaksanakan, tujuan program belum efektif dimana kesejahteraan petani belum tercapai secara maksimal dan efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program dan harus ada penambahan SDM pelaksana sesuai dengan Teori Efektivitas Kebijakan dari Dunn (2003:610). Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani belum efektif karena banyaknya instrumen yang tidak terpenuhi.

**Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Tata Niaga Beras, Kesejahteraan Petani**

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECTIVENESS OF RICE PRIVATE VOCATIONAL POLICY IN IMPROVING FARMER WELFARE (Study in East Ogan Komering Ulu District of South Sumatra Province in 2017)**

**By  
WIDIA NOVITA LUKITASARI.WA**

The policy on the trade of rice in the East Ogan Komering Ulu (OKU) Regency with various derivative strategies cannot be applied to significantly improve farmers' welfare. The purpose of this study was to study the factors that influence the rice trade policy policy in improving the welfare of farmers in OKU District of South Sumatra Province in 2017. The type of research uses a type of qualitative research. Data analysis in research involving qualitative data usage and analysis in interpreting data about variables, non-quantitative and support for conducting in-depth and non-extensive tracing of phenomena. The results showed that the factors that influence the effectiveness of the rice trade system policy in improving the welfare of farmers in East OKU District of South Sumatra Province in 2017 include the clarity of the objectives of the program, target programs and effective work units in accordance with Dunn's Policy Effectiveness Theory (2003: 610 ) While the inhibiting factor for the effectiveness of the rice trade system policy in improving the welfare of farmers in OKU Regency, South Sumatra Province, is the clarity of strategies for achieving program objectives that have not been effective and there has been no follow-up, formulation of program policies that have not been solid and less in favor of farmers, inappropriate and need improvement, the provision of facilities and infrastructure is incomplete and if there are still minimal, operational programs have not been effective, there are still many plans and shortcomings, functional programs have not been effective, program objectives have not been effective and there must be implementing HR approval in accordance with the Policy Effectiveness Theory of Dunn (2003: 610). Based on these findings it can be decided that the rice trade policy policy in improving farmers' welfare has not been effective because of a number of instruments that have not been fulfilled.

**Keywords: Policy Effectiveness, Rice Trading, Farmer Welfare**

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN TATA NIAGA BERAS DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI  
(Studi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017)**

**Oleh**

**Widia Novita Lukitasari. WA**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN TATA NIAGA  
BERAS DALAM PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN PETANI (Studi di  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017)**

Nama Mahasiswa : **Widia Novita Lukitasari, WA**

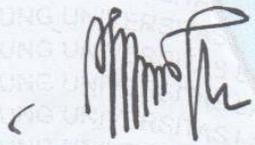
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516021001

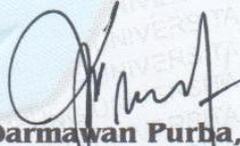
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.**  
NIP 19780430 200812 1 001

  
**Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**  
NIP 19810601 201012 1 003

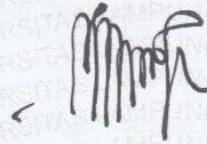
**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001

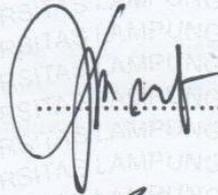
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.** .....



**Sekretaris : Darmawan Purba, S.IP., M.IP.** .....



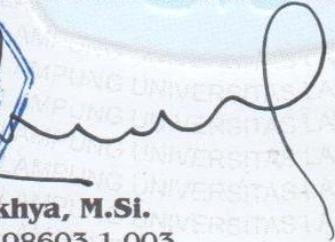
**Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.** .....



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Syarif Makhya, M.Si.**  
NIP 19590803 198603 1 003



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juni 2019**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Juni 2019

**Yang Membuat Pernyataan**



**Widia Novita Lukitasari.WA**  
**NPM. 1516021001**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Widia Novita Lukitasari.WA, dilahirkan di Tanjung Sari OKU pada tanggal 25 November 1996, buah hati dari pasangan Drs. Joko Wijianto dan Dra.Wartini. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis memiliki seorang kakak perempuan bernama Ika Apita Lukita Sari.WA, S.Ked dan seorang adik laki-laki bernama Bagas Sakti Wijaya.WA .

Jenjang pendidikan penulis adalah TK Muhammadiyah Rawa Bening yang diselesaikan pada tahun 2003. Penulis melanjutkan ke SD Negeri 1 Eling-Eling yang diselesaikan tahun 2009, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Belitang dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Martapura dan diselesaikan pada tahun 2015 dengan hasil yang baik.

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Pada Januari 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.

## **MOTTO**

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah Swt.

(Imam bin Al Qayim)

You Can If You Think You Can And Can.

(Widia Novita Lukitasari.WA)

Ingatlah Allah.Swt saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu.

Allah.Swt pasti punya jalan yang lebih baik untukmu.

(Anonim)

## **PERSEMBAHAN**

Segala Hormat Puji dan Syukur atas rahmad dan ridho Allah SWT, yang senantiasa telah memberikan nikmat dan berkah-Nya di setiap hembusan nafas, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini :

Kupersembahkan Karya ini  
Kepada:

Ayah dan Ibu tercinta  
*Drs. Joko Wijianto dan Dra. Wartini*  
Kakak dan Adikku tersayang  
*Ika Apita Lukita Sari.WA, S.Ked dan Bagas Sakti Wijaya.WA*

Sahabat-sahabat seperjuangan, serta

**ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANWACANA

*Alhamdulillahirrobil'amin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya dari Allah SWT Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kebijakan Tata Niaga Beras Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani (Studi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas serta selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan support sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah sabar membimbing dan memberikan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan support sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Terutama dan teristimewa kepada kedua orangtuaku Drs. Joko Wijianto dan Dra. Wartini yang telah memberikan materil, kepercayaan, dukungan serta doa kepadaku selama ini sehingga dapat terselesaikannya karya tulis ini. Kepada kakakku Ika Apita Lukita Sari WA, S.Ked dan adikku Bagas Sakti Wijaya. WA terimakasih support yang telah diberikan semoga kita dapat senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kepada kakek dan nenekku terimakasih atas .doa dan dukungannya.

8. Kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang sudah banyak membantu dalam kelancaran penelitian ini. Terkhusus kepada Bapak Bapak Ir. Ruzuan Efendi selaku kepala dinas dan Bapak Sigit Pramono, S.E,M.M. selaku Kepala Bidang Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam penelitian. Terima kasih atas saran, motivasi serta bantuan yang telah diberikan selama saya melakukan penelitian di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang sudah banyak membantu dalam kelancaran penelitian ini. Terkhusus kepada Bapak Sujarwanto, S.P., M.M., Ibu Novi yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam penelitian. Terima kasih atas saran, motivasi serta bantuan yang telah diberikan selama saya melakukan penelitian di Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kepada Bapak Sungkono, Hariono, Suhartono, Trianggono, Darmanto, Deni Widodo yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam penelitian. Terima kasih atas saran, motivasi serta bantuan yang telah diberikan selama saya melakukan penelitian di Kelompok Tani, Gapoktan dan Pedagang Beras di Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur serta di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.

11. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan SMA: Indah Apriyanti, Khoriro Handayani, A.md., Nila Rifkiyah,Amd. Keb, Mitha Yulia Kurniati, Leni Nur Azizah. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita dulu semua nya terwujud ya! Aamiin.
12. Terimakasih Devi Andini, Rizkia Amalia, Dea Permata Tamami, Nurhasanah dan sahabat berbagi suka dan duka, makasih buat support dan doanya juga, semoga kita bisa menggapai cita-cita kita yaa. Aamiin.
13. Kepada sahabat perkuliahan Aprilia,S.IP, Anisa Erlitsya Marchelina,S.IP, Amelisa Nurzahara,S.IP, dan Khairunnisa Maulida,S.IP. Makasih buat semuanya selama kuliah ini, tiada hari terlewati tanpa kalian. See you on top girls.
14. Temen-temen KKN Desa Tanjungan, Made Arya Wijaya, S.T, Ester Y, Anisantika CahyatiS.IP, Hamimatu Zahrok, Angga Prasetya, M.Haidir, SH. Sukses selalu guys dan kita silaturahmi lagi ke Tanjungan.
15. Kepada Sahabat Seper Travelingan serta Keluarga Seper rantauan Fauzan Mustofa, Dinda Nurfadilah, Berliyansyah, Berry Rola Sandi, Yuris Via Amalia, Anjar Wulan Sari, Putri Mayang Sari, Eko Prastyo, Dika Pristian Putri, Junnaty, Jessica Ningrum Cahyani,Dedi Riyanto,Ambar Fiandani, Ika Ayu Pratiwi, Erliana Hermanto. Love you guys.
16. Terimakasih untuk Adik Asa Ningtyas Handayani dan Adik M.Ridho, yang sudah menemani untuk menyelesaikan wawancara skripsiku di atas teriknya matahari kala itu.
17. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2015: Kepada Sri Mulya Ningsih,S.IP, Ifa Nurul Khotimah,S.IP, Lisdaria,S.IP, Destriana

Hutabarat,S.IP, Vina Narulita,S.IP, Ni Kadek Poniasih,S.IP, Ismi Marifa,S.IP, Merita Andriani,S.IP, Anisa Rizki,S.IP, Nur Indah,S.IP, Hardining Tyas,S.IP, M.Fikry Kamil,S.IP, M.Fajar Novriansyah,S.IP, M.Roby Ulzikri,S.IP, Arif Kurniadi,S.IP, Robby Ahmadi,S.IP, Alek Sanjaya,S.IP, Untsa Sholihah,S.IP, Santini,S.IP, Novita Anggraini,S.IP, Fadel Alamsyah,S.IP, Feggy,S.IP, Pascal Prabowo,S.IP, Yopi Pradana,S.IP, Irda Yustina,S.IP, Putri Wahyu A,S.IP, Fernanda Arghiea Pramesti,S.IP, Fani Destia,S.IP, Linda Margareta,S.IP, Nurul E,S.IP, Richo Riansyah,S.IP, Prastya Buana,S.IP, Andriani Susanto,S.IP, Bagas Alrobi,S.IP, Yulianda Amalia Sari,S.IP, Meisandra,S.IP, Erica Hermala,S.IP, Dina Mei Fitriana,S.IP, Sekar Arum Maheswari,S.IP. dan semua yang tidak tersebut Ilmu Pemerintahan 2015. Terima kasih sudah menjadi bagian yang penting dalam masa perkuliahan.

18. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 19 Juni 2019  
Penulis

Widia Novita Lukitasari. WA

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>Daftar Tabel</b> .....	ii
<b>Daftar Gambar</b> .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Efektivitas .....	13
B. Konsep Kebijakan Publik.....	16
C. Konsep Tata Niaga Beras.....	26
D. Konsep Pertanian dan Kesejahteraan .....	31
E. Kerangka Pikir .....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	38
B. Fokus Penelitian .....	39
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Jenis Data .....	42
E. Penentuan Informan .....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Pengolahan Data .....	45
H. Teknik Analisis Data.....	46
I. Triangulasi Data Sebagai Metode Validasi Data .....	48
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Profil Kabupaten OKU Timur .....	50
B. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten OKU Timur	59
C. Data Statistik Kabupaten OKU Timur .....	68
<b>V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	71
1. Kejelasan tujuan program.....	71
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan .....	77

3. Perumusan kebijakan program yang mantap .....	81
4. Penyusunan program yang tepat .....	85
5. Penyediaan sarana dan prasarana .....	90
6. Efektivitas Operasional Program .....	95
7. Efektivitas fungsional program .....	100
8. Efektivitas tujuan program .....	104
9. Efektivitas sasaran program .....	109
10. Efektivitas Individu dalam Pelaksanaan Kebijakan .....	114
11. Efektivitas Unit Kerja dalam Pelaksanaan Kebijakan .....	119
B. Pembahasan .....	124
1. Faktor Pendukung .....	124
2. Faktor Penghambat .....	125
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	136

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Rata-rata Produksi Beras di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 dan 2017 .....	4
2. Harga beras di Kabupaten OKU Timur tahun 2016.....	5
3. Harga beras di Kabupaten OKU Timur tahun 2017.....	6
4. Harga beras di Kabupaten OKU Timur tahun 2018.....	6
5. Data Angka Kemiskinan di Kabupaten OKU Timur Tahun 2012-2016 .....	8
6. Kriteria Evaluasi.....	26
7. Data Jumlah dan Komposisi Penduduk di Kabupaten OKU Timur. ....	58
8. Data Jumlah Petani di Kabupaten OKU Timur.....	59
9. Data luas lahan pertanian di Kabupaten OKU Timur .....	69
10. Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Timur.....	69
11. Data Angka Kemiskinan di Kabupaten OKU Timur Tahun 2012-2016....	70
12. Triangulasi Data Kejelasan Tujuan Program .....	74
13. Triangulasi Data Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan .....	78
14. Triangulasi Data Perumusan Kebijakan Program yang Mantap.....	83
15. Triangulasi Data Penyusunan Program yang tepat .....	87
16. Triangulasi Data Penyediaan sarana dan prasarana .....	92
17. Triangulasi Data Efektivitas Operasional Program.....	97
18. Triangulasi Data Fungsional Program Kebijakan .....	102
19. Triangulasi Data Tujuan Program .....	107
20. Triangulasi Data Sasaran Program .....	112
21. Triangulasi Data Individu Dalam Pelaksanaan Program .....	116
22. Triangulasi Data Unit Kerja Dalam Pelaksanaan Program .....	121

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian .....	37
2. Peta Kabupaten OKU Timur .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaannya harus terus dilakukan oleh pemerintah pada tiap tingkatan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Penguatan sektor pertanian menjadi semakin penting karena jumlah penduduk Indonesia sebagian besar hidup di kawasan pedesaan dengan mata pencaharian utama sebagai petani. Semakin besar jumlah petani yang sejahtera maka berarti semakin banyak masyarakat Indonesia yang akan sejahtera.

Sektor pertanian yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak sudah semestinya menjadi sasaran perlindungan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil. Upaya melindungi dan memberdayakan petani dan pelaku usaha tani lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga selaras dengan amanat konstitusi. Kata kunci “melindungi” dan “memajukan kesejahteraan umum” dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam alinea keempat, yang berbunyi :

“Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Menurut Fatkhullah (2016:6), konstruksi “kesejahteraan” pada masyarakat petani yang menganut etika subsistem ialah bagaimana mereka bisa hidup dengan meminimalkan segala resiko (*safety-first*) dan hidup berdampingan dengan saling memberi dan menerima hubungan resiprokal antara *patron* dan *klien*-nya. Selama ini, petani selalu berada pada posisi *klien* (rekan) sedangkan pengusaha sektor pertanian cenderung menjadi *patron* (sesorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh), sehingga tidak heran jika masyarakat petani tidak pernah berada jauh dari masalah kemiskinan. Oleh karena itu, konsep dan konstruksi kesejahteraan yang diyakini pada masyarakat petani bukanlah pada suatu kondisi keamanan, kemandirian, ataupun penghapusan kemiskinan itu sendiri. Apa yang menjadi keyakinan terhadap kesejahteraan sejati sesungguhnya terletak pada bagaimana mereka (petani, pemerintah, dan pengusaha sektor pertanian) bisa saling memberi dan menerima dalam suatu kondisi yang serba minimal dari risiko (Fatkhullah, 2016:6). Namun demikian, kondisi saat ini di Indonesia menunjukkan betapa petani masih berada pada posisi yang lemah dan pada gilirannya berakibat pada masih tingginya angka kemiskinan petani.

Selain itu, kondisi kemiskinan petani juga disebabkan oleh adanya permasalahan pada sistem pertanian sawah dan tata niaga beras yang menyebabkan petani tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang cukup untuk mengatur pasar atau menentukan harga. Petani kecil pada umumnya sulit melakukan prinsip “petik-olah-jual”. Akibatnya petani menerima bagian yang sangat sedikit dibandingkan keseluruhan nilai komoditi yang dihasilkan.

Akibat bagian yang diterima petani sangat kecil menyebabkan rangsangan untuk berproduksi menjadi sangat rendah, khususnya untuk produksi tanaman pangan (Sutjipta, 2016:68).

Sebagai upaya melindungi para petani dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka, Mubyarto (2012:69) menekankan bahwa campur tangan pemerintah dalam pengaturan sangat diperlukan. Kesalahan kebijakan akan berpengaruh secara meluas pada keseluruhan sistem pertanian. Misalnya dalam agropolitik pengaturan produksi dan tata niaga beras yang terlalu melindungi konsumen, akibatnya nilai tukar petani (NTP) dari tahun ke tahun semakin menurun. Akibat kebijakan yang tidak menguntungkan petani, produksi padi mengalami kemandegan (*levelling off*), bahkan mengalami penurunan sehingga Indonesia kembali menjadi pengimpor beras terbesar di dunia yang disebabkan karena petani tidak terangsang untuk berproduksi.

Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten OKU Timur merupakan salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sumatera Selatan. Potensi tersebut ini didukung oleh adanya Bendungan Perjaya dan jaringan irigasi yang memadai. Petani banyak yang mengandalkan jaringan irigasi ini walaupun terdapat juga usaha pertanian perladangan dan sawah tadah hujan.<sup>1</sup> Sebagai daerah yang memiliki potensi besar pada sektor primer pertanian dan perkebunan, kabupaten ini memiliki perkembangan jumlah produksi pertanian yang terus meningkat. Pada tahun 2015 luas lahan panen mencapai 104.905 ha, naik menjadi 105.972 ha dengan jumlah gabah produksi pada tahun 2016 mencapai 617.943 ton gabah kering panen

---

<sup>1</sup> M. Achsan Atjo, *Sawah Irigasi OKU Timur, Secercah Asa LTT Sumsel di tengah Paceklik*, <http://www.berita2bahasa.com/berita/08/18582408-sawah-irigasi-oku-timur-secercah-asa-ltt-sumsel-di-tengah-paceklik>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2018 Pukul 08.15 WIB

(GKP). Artinya per hektar lahan padi memproduksi 5.91 ton. Produksi padi mengalami kenaikan jumlah produksi sebesar 1.01% dari tahun 2015. Sebanyak 19.36% dari 391.732 ton total produksi beras dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten OKU Timur, sedangkan 80.64% menjadi komoditas pangan nasional.<sup>2</sup>

Adapun tiga kecamatan penghasil beras terbesar di Kabupaten OKU Timur adalah Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur, dan Kecamatan Belitang.<sup>3</sup> Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Rata-rata Produksi Beras di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 dan 2017

No	Kecamatan	Rata-Rata Produksi (Ton/Ha)	
		2016	2017
1	Martapura	9,706	8,128
2	Bunga Mayang	9,159	11,271
3	Jayapura	3,676	3,997
4	BP. Peliung	31,697	30,952
5	Buay Madang	84,590	61,860
6	Buay Madang Timur	36,665	58,734
7	Buay Pemuka Bangsa Raja	36,445	34,626
8	Madang Suku I	46,936	34,815
9	Madang Suku II	38,762	38,141
10	Madang Suku III	6,421	9,573
11	Belitang Madang Raya	31,440	23,050
12	Belitang Jaya	8,559	10,031
13	Belitang Mulya	26,005	25,062
14	Belitang	64,756	48,625
15	Belitang II	27,644	18,786
16	Belitang II	23,557	20,045
17	Semendawai Suku III	51,188	43,630
18	Semendawai Timur	33,485	28,552
19	Semendawai Barat	25,062	19,442
20	Cempaka	25,204	31,946
Jumlah		430,364	367,363

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten OKU Timur, 2018

<sup>2</sup> <http://www.okutimurkab.go.id>, diakses pada Tanggal 28 Agustus 2018 Pukul 20.18 WIB

<sup>3</sup> Pertanian, <http://www.okutimurkab.go.id>, diakses pada Tanggal 28 Agustus 2018 Pukul 20.18 WIB

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa produksi beras di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 sebesar 430,364 ton dan tahun 2017 sebesar 367,363 ton. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan produksi beras di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten OKU Timur yang lebih dikenal sebagai kabupaten lumbung beras di Provinsi Sumatera Selatan ternyata mengalami permasalahan produktivitas komoditi beras yang beragam. Meskipun produktivitas beras di kabupaten ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu berkisar 2,2 ton-3,0 ton beras per hektar setiap musim panen, namun nilai produknya justru masih rendah karena hanya Rp9,24 juta-Rp12,6 juta (per ha). Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan petani untuk bertahan menjual gabah setelah panen karena gabah mereka telah dibeli oleh tengkulak jauh hari sebelum panen tiba. Hasil pemantauan harga beras di tingkat petani, distributor dan pengecer di Kabupaten OKU Timur selama tahun 2016-2018 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Harga beras di Kabupaten OKU Timur tahun 2016

No	Bulan	Harga Beras (Tahun 2016)		
		Petani	Distributor	Pengecer
1	Januari	Rp. 10.000	Rp. 10.500	Rp. 11.000
2	Februari	Rp. 9.000	Rp. 9.300	Rp. 10.500
3	Maret	Rp. 8.500	Rp. 9.000	Rp. 10.000
4	April	Rp. 8.500	Rp. 9.000	Rp. 10.000
5	Mei	Rp. 8.500	Rp. 9.000	Rp. 10.000
6	Juni	Rp. 8.500	Rp. 9.000	Rp. 10.000
7	Juli	Rp. 8.500	Rp. 9.000	Rp. 10.000
8	Agustus	Rp. 8.500	Rp. 9.000	Rp. 10.000
9	September	Rp. 8.500	Rp. 9.000	Rp. 10.000
10	Oktober	Rp. 8.600	Rp. 9.200	Rp. 10.300
11	November	Rp. 8.600	Rp. 9.200	Rp. 10.300
12	Desember	Rp. 8.600	Rp. 9.500	Rp. 10.500
Jumlah		Rp. 104.700	Rp. 110.700	Rp. 122.600

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten OKU Timur (2016)

Tabel 3. Harga beras di Kabupaten OKU Timur tahun 2017

No	Bulan	Harga Beras (Tahun 2017)		
		Petani	Distributor	Pengecer
1	Januari	Rp. 9.000	Rp. 9.500	Rp. 10.500
2	Februari	Rp. 8.300	Rp. 9.000	Rp. 10.000
3	Maret	Rp. 7.800	Rp. 8.500	Rp. 9.500
4	April	Rp. 7.800	Rp. 8.500	Rp. 9.500
5	Mei	Rp. 7.800	Rp. 8.500	Rp. 9.500
6	Juni	Rp. 7.800	Rp. 8.500	Rp. 9.500
7	Juli	Rp. 7.800	Rp. 8.500	Rp. 9.500
8	Agustus	Rp. 8.200	Rp. 8.500	Rp. 9.500
9	September	Rp. 8.200	Rp. 8.500	Rp. 9.500
10	Oktober	Rp. 8.200	Rp. 8.500	Rp. 9.500
11	November	Rp. 8.700	Rp. 9.500	Rp. 10.500
12	Desember	Rp. 8.700	Rp. 9.500	Rp. 10.500
Jumlah		Rp. 98.300	Rp. 105.500	Rp. 117.500

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten OKU Timur (2017)

Tabel 4. Harga beras di Kabupaten OKU Timur tahun 2018

No	Bulan	Harga Beras (Tahun 2018)		
		Petani	Distributor	Pengecer
1	Januari	Rp. 9.000	Rp. 9.500	Rp. 10.000
2	Februari	Rp. 8.000	Rp. 8.500	Rp. 9.000
3	Maret	Rp. 7.600	Rp. 8.300	Rp. 8.800
4	April	Rp. 7.600	Rp. 8.300	Rp. 8.800
5	Mei	Rp. 7.600	Rp. 8.300	Rp. 8.800
6	Juni	Rp. 7.600	Rp. 8.300	Rp. 8.800
7	Juli	Rp. 7.600	Rp. 8.300	Rp. 8.800
8	Agustus	Rp. 7.600	Rp. 8.300	Rp. 8.800
9	September	Rp. 8.600	Rp. 9.000	Rp. 10.000
10	Oktober	Rp. 8.600	Rp. 9.000	Rp. 10.000
11	November	Rp. 8.600	Rp. 9.000	Rp. 10.000
12	Desember	Rp. 9.000	Rp. 9.300	Rp. 10.500
Jumlah		Rp. 97.400	Rp. 104.100	Rp. 112.300

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten OKU Timur (2018)

Tabel 2 sampai Tabel 4 menunjukkan pergerakan harga beras tingkat petani, distributor dan pengecer di Kabupaten OKU Timur selama tahun 2016-2018 yang terus mengalami penurunan harga, dimana pada tahun 2016 total harga beras tingkat petani sebesar Rp.104.700, distributor sebesar Rp. 110.700 dan pengecer sebesar Rp. 122.600. Pada tahun 2017 total harga beras tingkat petani

sebesar Rp. 98.300, distributor sebesar Rp. 105.500 dan pengecer sebesar Rp. 117.500. Pada tahun 2018 total harga beras tingkat petani sebesar Rp. 97.400, distributor sebesar Rp. 104.100 dan pengecer sebesar Rp. 112.300.

Sebenarnya, kondisi ketidakmampuan petani menjual gabah dalam bentuk beras disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan tata niaga beras yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Dalam peraturan tersebut diatur secara tegas tentang dua hal. *Pertama*, perlunya pemerintah melindungi dan membina petani untuk dapat menjual produksi pertaniannya dalam bentuk beras bukan gabah. *Kedua*, adanya harga beras minimal yang harus dibeli oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah dari para petani, terutama pada saat terjadinya panen raya.

Dalam skala lokal, kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani juga merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten OKU Timur untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Strategi tersebut dilakukan dengan memberi kemudahan berupa subsidi pupuk, benih dan berbagai bantuan, membangun infrastruktur irigasi dan lahan, mekanisasi untuk efisiensi produksi dan mutu hasil, pelatihan, penyuluhan, asuransi usaha tani dan lainnya. Secara teknis, kebijakan dan strategi tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten OKU Timur.

Namun demikian, kebijakan tata niaga beras di Kabupaten OKU Timur belum efektif dalam mencapai tujuannya. Adanya kebijakan tata niaga beras di Kabupaten OKU Timur dengan berbagai strategi turunannya sebagaimana dijelaskan di atas ternyata belum dapat meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan. Selain produktifitas gabah/beras yang semakin menurun, harga beras di Kabupaten OKU Timur terus mengalami penurunan menyusul panen raya yang terus bergulir setiap hari. Saat ini harga beras di wilayah Kecamatan Belitang, misalnya, menurun hingga Rp. 8.700 Per kilogram dari sebelumnya harga beras mencapai Rp. 9.500 hingga Rp. 10 Ribu per kilogram.<sup>4</sup>

Secara lebih luas, sebagai akibat dari ketidakefektifan kebijakan tata niaga beras tersebut angka kemiskinan di Kabupaten OKU Timur tetap tinggi dan bahkan mengalami kenaikan tiap tahun. Berdasarkan data BPS Kabupaten OKU Timur diketahui bahwa angka kemiskinan selama tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 11.29%. Berikut dijabarkan data angka kemiskinan di Kabupaten OKU Timur.

Tabel 5. Data Angka Kemiskinan di Kabupaten OKU Timur Tahun 2012-2016

No	Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1	2012	56.510	8,98%
2	2013	65.410	10,28%
3	2014	65.250	10,13%
4	2015	72.840	11,24%
5	2016	73.930	11,29%

Sumber: BPS Kabupaten OKU Timur (2017).

<sup>4</sup> Evan Hendra, 2018, *Harga Beras di Kabupaten OKU Timur Terus Turun*, Artikel Pertanian <http://palembang.tribunnews.com/2018/03/06/mamasuki-masa-panen-harga-beras-di-kabupaten-oku-timur-terus-turun>, diakses pada Tanggal 4 Januari 2019 Pukul 08.20 WIB.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut. *Pertama*, hasil penelitian Prima Sari Esti Eysa (2011) tentang analisis tata niaga gabah/beras dari Kenagarian Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan tata niaga gabah/beras mendapatkan efisiensi pada beberapa saluran di mana saluran 2 merupakan saluran yang efisien karena mampu menyalurkan barang setiap 1 kg gabah/beras dengan biaya 7,79% dari nilai produk yang dipasarkan, sedangkan pada saluran 1 setiap 1 kg gabah dan beras membutuhkan biaya sebanyak 8,07% dari nilai produk yang dipasarkan.

*Kedua*, hasil penelitian Didin S. Damanhuri (2010) tentang Akar Problematik Ekonomi Politik Pertanian dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya posisi petani adalah adanya intervensi pemerintah dalam pengendalian harga gabah/beras. Semula dianggap bahwa pengendalian itu diperlukan karena beras merupakan komponen terbesar dalam inflasi. Akan tetapi setelah diteliti, hasilnya menunjukkan bahwa beras bukanlah penyumbang terbesar laju inflasi.

*Ketiga*, penelitian Agistari Linawarti (2015) berjudul Analisis Saluran Tata Niaga Beras di Wilayah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Analisis pola saluran distribusi pemasaran beras dan nilai tambah distribusi adalah terdapat tiga saluran pemasaran di Desa Watugede. Lembaga tata niaga yang terlibat dalam pemasaran beras adalah penggilingan padi, pedagang besar yang berasal dari Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, pedagang pasar dan

pedagang pengecer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tata niaga beras menunjukkan adanya manfaat dalam memperpanjang mata rantai perpindahan produk dari produsen kepada konsumen.

*Keempat*, hasil penelitian Lokot Zein Nasution (2016) tentang Reposisi Peran dan Fungsi Bulog Dalam Tata Niaga Pangan menunjukkan bahwa kinerja tata niaga yang buruk setelah BULOG menjadi Perum terjadi karena struktur pasar di tingkat hulu yang bersifat monopsoni dan di tingkat hilir yang bersifat oligopoli. *Kelima*, hasil penelitian Alissha Fitri (2018) mengenai Pengaruh Pengurangan Impor Beras Pakistan Terhadap Petani Beras Indonesia. Adapun kesimpulannya adalah bahwasannya Indonesia sebagai negara berkembang yang jumlah penduduknya banyak harus menghindari ketergantungan yang terlalu besar kepada beras asal impor, karena banyak mengandung risiko. Oleh karena itu, strategi tata niaga pangan secara umum harus semakin dioptimalkan.

Beberapa penelitian tersebut di atas secara umum menunjukkan bahwa kebijakan tata niaga beras atau tata niaga pangan sejatinya mampu meningkatkan efisiensi dan harga jual produksi pertanian. Berikutnya, kinerja buruk dari Perum BULOG yang diberikan kewenangan untuk membeli produk pertanian petani menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebijakan tata niaga beras belum dapat mencapai tujuannya secara optimal.

Berdasarkan data dan hasil penelitian sebelumnya tersebut, maka penelitian ini adalah untuk menindaklanjuti berbagai temuan tersebut. Ketidakefektifan kebijakan tata niaga beras di Kabupaten OKU Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi titik pijak penelitian. Berikutnya, kinerja Perum BULOG yang buruk di beberapa tempat menjadi salah satu penyebab

kegagalan kebijakan tata niaga beras. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang efektivitas kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini didasarkan pada adanya *problem statement* yakni adanya fakta ketidakefektifan kebijakan tata niaga beras di Kabupaten OKU Timur. Meskipun kebijakan tata niaga beras telah dilakukan di kabupaten ini dalam berbagai bentuk strategi dan program, namun ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani secara umum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian (*research question*) pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

##### **1. Secara teoritis**

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan suatu kebijakan publik, khususnya kebijakan tata niaga beras.
- b. Peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya terutama dalam mengevaluasi faktor-faktor yang ditemukan sebagai penyebab tidak efektifnya suatu kebijakan. Kasus kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani menjadi obyek pembuka bagi penelitian pada kasus-kasus kebijakan yang lainnya.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Kabupaten OKU Timur dalam mengefektifkan implementasi kebijakan tata niaga beras dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani.
- b. Bagi petani diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui implementasi kebijakan tata niaga beras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Timur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep dan Ukuran Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas lainnya, dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.

Pendapat lain dinyatakan oleh Susanto (1975:156), yang menyebutkan bahwa efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Barnard (dalam Prawirosentono, 2008:27) mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika tujuan

yang direncanakan dalam sebuah kebijakan atau program dapat tercapai setelah kebijakan atau program tersebut dijalankan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka untuk menilai efektifitas diperlukan suatu ukuran sebagai suatu standar akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Terdapat beberapa ukuran untuk menilai efektifitas atau indikator untuk mengukur mengapa suatu kebijakan dapat tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan tersebut.

Krech, Cruthfied, dan Ballachey (dalam Danim, 2004:119-120) secara khusus menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran dari efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Dalam beberapa kasus, ukuran efektifitas yang dibuat oleh Krech, Cruthfied, dan Ballachey tersebut lebih sering dipakai untuk mengukur efektivitas ekonomi. Pada konsep yang lain, ukuran dari efektivitas juga mensyaratkan adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran dari efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi, sebagaimana diungkapkan Cambell.

Menurut pendapat Cambell (dalam Steers, 1985:46-48) menyebutkan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu

- 1) Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
- 2) Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
- 3) Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
- 4) Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
- 5) Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
- 6) Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
- 7) Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
- 8) Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
- 9) Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
- 10) Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
- 11) Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
- 12) Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;

Adapun Dunn (2003:610) menegaskan bahwa dimensi efektivitas program diuraikan menjadi beberapa indikator, yaitu (1) Kejelasan tujuan program; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan program; (3) Perumusan kebijakan program yang mantap; (4) Penyusunan program yang tepat; (5) Penyediaan sarana dan prasarana; (6) Efektivitas operasional program; (7) Efektivitas fungsional program; (8) Efektivitas tujuan program; (9) Efektivitas sasaran program; (10) Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program; dan (11) Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.

## **B. Konsep Kebijakan Publik**

## 1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku dari organisasi pemerintah. Menurut pendapat Sirait (1991:115) kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan sistem yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.

Dunn (2003:132) menyebutkan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan dapat dilakukan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Edward III dan Sharkansky (dalam Widodo, 2001:190) mengemukakan kebijakan publik adalah *What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs*. (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau

tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah). Pendapat Edward III dan Sharkansky (dalam Budiardjo, 2000:56) mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Miriam Budiardjo (2000:56) mengemukakan pengertian kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Syafie (1992:35) mengutip pendapat Harold Laswell, kebijakan adalah tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan pemilihan kemungkinan. Adapun menurut pendapat Harold Laswell (dalam Muchsin dan Fadillah, 2002:23), kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan dimasa depan, serta melakukan penelitian dan evaluasi. Sedangkan Easton (2003:176) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah proses

pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.

Kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai sifat “paksaan” yang secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Pemahaman ini, pada sebuah kebijakan umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dalam bentuk Peraturan Daerah misalnya. Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut. Perlu diperhatikan, kebijakan publik tidaklah sama dengan hukum, walaupun dalam sasaran praktis di lapangan kedua-duanya sulit dipisah-pisahkan.

## **2. Perumusan Kebijakan Publik**

Perumusan masalah merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu kebijakan publik. Menurut Dunn (2003:26) suatu perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*). Hal tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat dikarenakan adanya masalah publik yang terjadi, sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dunn (2003:26) menambahkan bahwa perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang

tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

Menurut Subarsono (2005: 24-25) langkah awal dari pembuatan kebijakan publik adalah perumusan kebijakan publik dengan menyusun setiap permasalahan publik yang terjadi seperti suatu agenda. Merumuskan masalah publik yang benar dan tepat dapat didasarkan atau melihat dari karakteristik masalah publik, yaitu

- a. Saling ketergantungan (*interdependence*) antara berbagai masalah.
- b. Subyektivitas dari masalah kebijakan.
- c. *Artificiality* masalah.
- d. Dinamika masalah kebijakan

Menurut Subarsono (2005:24-25) merumuskan masalah dapat dikatakan tidaklah mudah karena sifat dari masalah publik bersifat kompleks. Oleh sebab itu lebih baik dalam merumuskan masalah mengetahui lebih dulu karakteristik permasalahannya.

- a. Suatu masalah tidak dapat berdiri sendiri oleh sebab itu, selalu ada keterkaitan antara masalah yang satu dengan yang lain. Sehingga dari hal tersebut mengharuskan dalam analisis kebijakan untuk menggunakan pendekatan holistik dalam memecahkan masalah dan dapat mengetahui akar dari permasalahan tersebut.
- b. Masalah kebijakan haruslah bersifat subyektif, dimana masalah tersebut merupakan hasil dari pemikiran dalam lingkungan tertentu.
- c. Suatu fenomena yang dianggap sebagai masalah karena adanya keinginan manusia untuk mengubah situasi.

- d. Suatu masalah kebijakan solusinya dapat berubah-ubah. Maksudnya adalah kebijakan yang sama untuk masalah yang sama belum tentu solusinya sama, karena mungkin dari waktunya yang berbeda atau lingkungannya yang berbeda.

### **3. Implementasi Kebijakan Publik**

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Menurut Tangkilisan (2003:9) implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Dunn (2003:132) implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi relisasi program yang dilaksanakan. Dunn mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (*policy implemtation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Adapun Nugroho (2004:158) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Widodo (2001:194) implementasi kebijakan publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Menurut Darwin (1993:28) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat.

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono (2005:101) mengemukakan bahwa terdapat beberapa

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program.
- b. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu disukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

#### **4. Evaluasi Kebijakan Publik**

##### **a. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, Dunn (2003:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2006:186) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Menurut Ndraha (1989:201) evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Adapun Danim (2000:14) mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu

- a. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
- b. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
- c. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil

yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya.

Menurut Muchsin dan Fadillah (2002:110), evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

#### **b. Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Menurut Dunn (2003:609-610), fungsi evaluasi, yaitu

“Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi”.

Berdasarkan pendapat Dunn (2003:609-610) di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu

- a. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
- b. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun “nilai”.

- c. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan.
- d. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

### **c. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (2003:610) mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Kriteria Evaluasi**

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survai warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif.

### C. Konsep Tata Niaga Beras

#### 1. Pengertian

Menurut Daniel (2012:155) istilah pemasaran dan tata niaga yang sering kita dengar dalam ucapan sehari-hari di negeri kita adalah terjemahan dari perkataan *marketing* atau biasa disebut tata niaga dari pada pemasaran. Kegunaan yang diciptakan oleh kegiatan tata niaga adalah kegunaan waktu, kegunaan tempat, dan kegunaan pemilikan. Kegunaan waktu berarti bahwa barang-barang mempunyai faedah (yang lebih besar) setelah terjadi perubahan waktu, kegunaan tempat berarti barang-barang itu mempunyai faedah atau kegunaan yang lebih besar karena perubahan tempat.

Tata niaga secara sederhana dikatakan sebagai proses penyaluran barang-barang dari produsen ke konsumen. Produsen adalah mata rantai pertama dan konsumen adalah mata rantai yang terakhir. Tata niaga adalah semua kegiatan bisnis yang terlibat dalam arus barang dan jasa dari titik produksi hingga barang dan jasa tersebut ada di tangan konsumen.

Menurut Kotler (2010:34) pemasaran atau tata niaga dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajerial dimana individu atau kelompok didalamnya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Daniel (2012:154) mendefinisikan pengertian tata niaga pertanian secara umum, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik barang-barang hasil pertanian dari tangan produsen ke tangan konsumen termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, tata niaga dapat disimpulkan sebagai tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan bergerak barang-barang dan jasa dari produsen sampai pada konsumen atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir tata niaga adalah menempatkan barang-barang ketangan konsumen akhir.

## **2. Analisis Tata Niaga**

Menurut Mursyid (2008:25) pemasaran adalah pertemuan antara penjual dan pembeli atau pasar merupakan tempat yang didalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Pemasaran (bahasa Inggris: *marketing*) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai

barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.

Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan produk, penetapan harga, pengiriman barang, dan mempromosikan barang. Seseorang yang bekerja di bidang pemasaran disebut pemasar. Pemasar ini sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia terutama pihak konsumen yang dituju. Dengan demikian, pemasaran merupakan proses penyalarsan sumber- sumber sebuah organisasi terhadap kebutuhan pasar. Pemasaran memberi perhatian pada hubungan timbal balik yang dinamis antara produk-produk dan jasa-jasa perusahaan, keinginan dan kebutuhan konsumen, dan kegiatan-kegiatan para pesaing.

Konsep-konsep inti pemasaran meliputi: kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, nilai dan kepuasan; pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar. Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan dan permintaan. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Sedangkan Permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya.

Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga dalam menjalankan usaha kecil khususnya diperlukan adanya

pengembangan melalui strategi pemasarannya. Karena pada saat kondisi kritis justru usaha kecil yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat. Sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial.

Menurut Kotler (2010:21), pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) pergerakan (*actuating*) dan pengawasan. Jadi dapat diartikan bahwa Manajemen Pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **3. Peranan Tata Niaga Beras Dalam Pembangunan Pertanian**

Menurut Saladin (2006:48) produktivitas hasil pertanian selalu mengalami fluktuasi, sedangkan harga hasil pertanian ditingkat produsen cenderung mengalami peningkatan yang cukup berarti, hal ini diduga berkaitan dengan rendahnya produktivitas dari hasil pertanian. Fluktuasi harga yang tinggi di sektor pertanian merupakan suatu fenomena yang umum akibat ketidakstabilan (*inherent instability*) pada sisi penawaran. Hal ini berarti harga hasil pertanian disebabkan oleh sifat alami dari produksi pertanian, yaitu dalam jangka pendek

tidak dapat merespon tambahan permintaan atau tidak dapat mengurangi produksi pada saat harga yang rendah.

Pengaruh fluktuasi harga pertanian lebih besar bila dibandingkan dengan fluktuasi produksi. Keadaan ini dapat menyebabkan petani menderita kerugian dalam jangka pendek sehingga menimbulkan kurangnya keinginan untuk melakukan investasi di sektor pertanian atau petani akan beralih ke komoditas yang memiliki harga jual yang lebih tinggi. Persoalan mutu dan harga hasil pertanian merupakan bagian dari masalah tata niaga hasil pertanian yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai dampak langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan hasil pertanian khususnya beras.

#### **4. Indikator Tata Niaga Beras**

Menurut Rahardi (2003: 45) tata niaga merupakan salah satu cabang aspek pemasaran yang menekankan bagaimana suatu produksi dapat sampai ke tangan konsumen (distribusi). Tataniaga dapat dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan hasil produksi kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya dan mampu mengadakan pembagian keuntungan yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan tataniaga.

Menurut Rahardi (2003:45) indikator tata niaga pertanian didasarkan pada konsep inti tataniaga beras sebagai berikut:

- a. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan
- b. Produk
- c. Utilitas, nilai dan kepuasan
- d. Pertukaran, transaksi, dan hubungan

- e. Pasar
- f. Pemasaran dan pemasar.

## **D. Konsep Pertanian dan Kesejahteraan**

### **1. Pertanian**

Menurut Suratiyah (2006:47), pertanian sebagai kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman yang termasuk tanaman semusim maupun tanaman tahunan dan tanaman pangan maupun tanaman non-pangan serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan. Dengan berbagai tujuan dan alasan mengapa lahan dibuka dan diusahakan oleh manusia. Apabila pertanian dianggap sebagai sumber kehidupan lapangan kerja.

Pertanian dapat mengandung dua arti yaitu (1) dalam arti sempit atau sehari-hari diartikan sebagai kegiatan cocok tanam dan (2) dalam arti luas diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut proses produksi menghasilkan bahan-bahan kebutuhan manusia yang dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan yang disertai dengan usaha untuk memperbaharui, memperbanyak (reproduksi) dan mempertimbangkan faktor ekonomis. Pertanian tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada suatu lahan tertentu, dalam hubungan tertentu antara manusia dengan lahannya yang disertai berbagai pertimbangan tertentu pula.

Menurut Rahim (2007:79), pertanian yaitu merupakan kegiatan dalam usaha mengembangkan (reproduksi) tumbuhan dan hewan supaya tumbuh lebih baik untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya bercocok tanam, beternak, dan melaut. Pertanian juga sebagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi berupa

penanaman tanaman atau usahatani (pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan), peternakan (beternak) dan perikanan (budidaya dan menangkap).

## **2. Kesejahteraan**

Menurut Nuryani (2007:45) kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007:96) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Menurut Rambe (2008:14) kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Arthur Dunham (dalam Sukoco, 2010: 91) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander (dalam Sukoco, 2010: 91) yang menekankan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat. Menurutnya,

*“Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community” (Friedlander, 2010:278).*

#### **E. Kerangka Pikir**

Kabupaten OKU Timur merupakan salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sumatera Selatan. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar pada sektor primer pertanian dan perkebunan, kabupaten ini memiliki perkembangan jumlah produksi pertanian yang terus meningkat. Pada tahun 2005 luas lahan panen mencapai 104.905 ha, naik menjadi 105.972 ha. Namun demikian, bertambahnya luas lahan panen tidak sebanding dengan kenaikan produksi beras karena yang terjadi justru adanya penurunan produksi beras selama 1 (satu) tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten OKU Timur yang dikenal sebagai kabupaten lumbung beras di Provinsi Sumatera Selatan ternyata mengalami permasalahan produktivitas komoditi beras yang beragam.

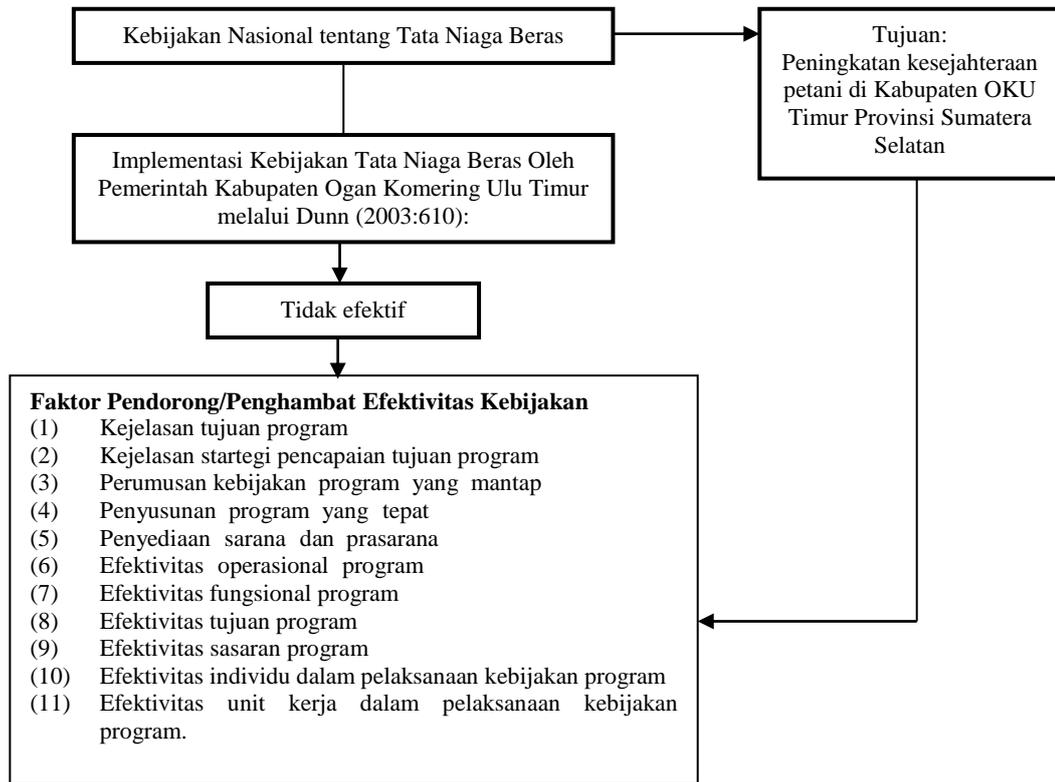
Meskipun produktivitas beras di kabupaten ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu berkisar 2,2 ton-3,0 ton beras per hektar setiap musim panen, namun nilai produknya justru masih rendah karena hanya Rp9,24 juta-Rp12,6 juta (per ha). Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan petani untuk bertahan menjual gabah setelah panen karena gabah mereka telah dibeli oleh tengkulak jauh hari sebelum panen tiba. Prinsip “petik-olah-jual” sebagai sistem yang ideal tidak dapat berjalan karena yang kemudian terjadi adalah prinsip “jual” langsung akibat posisi tawar petani yang rendah maupun desakan kebutuhan ekonomi sehingga mereka langsung menjual gabahnya setelah panen.

Kondisi ketidakmampuan petani menjual gabah dalam bentuk beras disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan tata niaga beras yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/5/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Dalam peraturan tersebut diatur secara tegas tentang dua hal. *Pertama*, perlunya pemerintah melindungi dan membina petani untuk dapat menjual produksi pertaniannya dalam bentuk beras bukan gabah. *Kedua*, adanya harga beras minimal yang harus dibeli oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah dari para petani, terutama pada saat terjadinya panen raya. Kebijakan tata niaga beras di Kabupaten OKU Timur menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten OKU Timur dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten OKU Timur.

Namun demikian, adanya kebijakan tata niaga beras di Kabupaten OKU Timur dengan berbagai strategi turunannya sebagaimana dijelaskan di atas ternyata belum dapat meningkatkan produksi beras secara signifikan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi bahasan penelitian (*research discussion*) pada penelitian ini efektivitas kebijakan tata niaga beras di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Teori Efektifitas Kebijakan dari Dunn (2003:610) yang terdiri dari 11 indikator akan menjadi landasan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang membuat kebijakan tata niaga beras di Kabupaten OKU Timur tidak efektif. Pemilihan kesebelas indikator tersebut adalah sesuai dengan tujuan kebijakan tata niaga beras yaitu kejelasan tujuan program, kejelasan strategi pencapaian tujuan program, perumusan kebijakan program yang mantap, penyusunan program yang tepat, penyediaan sarana dan prasarana, efektivitas operasional program, efektivitas fungsional program, efektivitas tujuan program, efektivitas sasaran program, efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program dan efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program. Dikatakan efektif jika kebijakan tata niaga beras di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan minimal 60% dari kesebelas indikator kebijakan, sedangkan dikatakan tidak efektif jika hasil pelaksanaan kebijakan tata niaga beras di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan tercapai < 60%.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat disusun bagan kerangka pikir sebagai berikut:



**Bagan 1.** Kerangka Pikir Penelitian

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut Prastowo (2016:22), Tipe penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya menurut Ahmadi (2016:14), kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tipe dan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata dan bukan berupa angka-angka. Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu secara terperinci.

Peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, dinamis, dan tidak mengeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan peneliti dalam melihat efektivitas kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan Tahun 2017 dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan kebijakan tata niaga beras tersebut. Untuk itu, penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangat penting keberadaannya untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang dimaksud membatasi peneliti adalah memberikan batas dalam pengumpulan data atau menentukan informan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Bagong dan Sutinah (2005:168), fokus penelitian adalah batas kajian penelitian yang ditentukan, maksudnya penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian seseorang peneliti kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya.

Peneliti menyimpulkan bahwa fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih spesifik.

Kemudian dengan penetapan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Mengingat pentingnya fokus penelitian untuk membuat penelitian lebih terarah dan efisien, maka penulis merumuskan fokus penelitian pada kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur dengan menggunakan 11 (sebelas) indikator efektivitas sebagaimana diungkapkan oleh Dunn, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan program

Merupakan kejelasan dari tujuan program kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Merupakan kejelasan dari tujuan program kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017.

3. Perumusan kebijakan program yang mantap

Merupakan kejelasan dari kebijakan program yang mantap dari program kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017.

4. Penyusunan program yang tepat

Merupakan ketepatan penyusunan program kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017.

5. Penyediaan sarana dan prasarana

Merupakan efektivitas penyediaan sarana dan prasarana dari program kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017

6. Efektivitas operasional program

Merupakan efektivitas operasional program kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017.

7. Efektivitas fungsional program

Merupakan efektivitas fungsional program kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017.

8. Efektivitas tujuan program

Merupakan efektivitas tujuan program kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017.

9. Efektivitas sasaran program

Merupakan efektivitas sasaran program kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017.

10. Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan

Merupakan efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017.

11. Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

Merupakan efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2016:128) dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan data maupun informasi yang telah dijelaskan dalam latar belakang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Pada

beberapa tempat, kebijakan tata niaga beras mayoritas mampu mencapai tujuannya, sedangkan di Kabupaten OKU Timur justru sebaliknya karena tujuan kebijakan tata niaga beras yang ditetapkan tidak dapat dicapai di kabupaten ini.

#### **D. Jenis Data**

Penulis harus mendapatkan data secara langsung dan akurat. Penulis harus mencari data dari sumber utama (*first hand*), dan bukan dari sumber kedua agar keabsahan data terjamin. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Data Primer**

Menurut Idrus (2009:86) data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber langsung atau yang mengetahui langsung data maupun informasi yang akan peneliti cari. Penelitian ini data diperoleh dengan wawancara dengan tatap muka antara peneliti dengan informan (perekaman menggunakan *handphone*). Informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan dalam penelitian ini mengetahui secara baik tentang pelaksanaan kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017.

##### **2. Data Sekunder**

Menurut Idrus (2009:86) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua atau secara tidak langsung.

## E. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui cara purposif sampel yaitu penetapan sampel yang didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatannya. Selaras dengan hal tersebut, menurut Nasution (dalam Prastowo, 2016:44) mengungkapkan bahwa metode kualitatif tidak menggunakan *random sampling* atau acak dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. Sampel biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian disebut informan.

Penulis menyimpulkan bahwa teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian dan yang lebih memahami permasalahan yang ada. Menurut Spradley (dalam Faisal, 1990:45) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka individu yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Sigit Pramono, S.E , M.M. selaku Kepala Bidang Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, wawancara Tanggal 4 Maret 2019.
2. Sungkono selaku Ketua Kelompok Tani Suka Maju Desa Karang Kemiri Barat Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wawancara Tanggal 10 Maret 2019.
3. Trianggono selaku Pedagang Beras di Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wawancara 10 Maret 2019.
4. Suhartono selaku Ketua Gapoktan Baru Muncul Desa Tebat Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wawancara Tanggal 5 Maret 2019.
5. Deni Widodo selaku Pedagang Beras Di Desa Tebat Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wawancara 10 Maret 2019.
6. Hariono selaku Ketua Kelompok Tani Karya Sentosa Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wawancara Tanggal 14 Maret 2019.
7. Darmanto selaku Pedagang Beras Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wawancara Tanggal 12 Maret 2019.

Pemilihan ketujuh informan tersebut berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta kemampuan memberikan informasi yang sesuai dengan masalah penelitian yaitu efektivitas kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui:

- a. Wawancara mendalam, dilakukan dengan tanya jawab langsung secara mendalam melalui panduan wawancara kepada pihak atau informan yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan kepada perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Kelompok Tani Suka Maju Desa Karang Kemiri Barat dan Pedagang Beras di Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ketua Gapoktan Baru Muncul dan Pedagang Beras Desa Tebat Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta Ketua Kelompok Tani Karya Sentosa dan Pedagang Beras Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- b. Observasi, yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan masalah penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 melalui peraturan daerah yang berhubungan dengan kebijakan tata niaga beras.

- c. Studi dokumentasi, merupakan salah satu sumber data sekunder yang juga diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi berupa foto kegiatan wawancara dengan informan, arsip peraturan daerah dan profil daerah.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta ‘diperas’ sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian. Mengacu pada Sugiyono (2017:115) teknik pengolahan data merupakan teknik operasional setelah data terkumpul. Adapun tahap-tahap pengolahan data pada penelitian ini adalah data:

1. Inventarisasi data

Pada tahap ini peneliti dengan mengumpulkan dan menyeleksi data sesuai dengan data yang dikaji sesuai permasalahan yang diteliti sesuai dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi hasil penelitian.

2. Menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Penyeleksian data ini dilakukan dengan cara memilah-milah data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan untuk ditentukan mana yang dapat berguna dan mana yang tidak dapat dipakai dalam penelitian.

3. Mengklasifikasikan data.

Data yang telah diseleksi tersebut diklasifikasikan dan dilihat jenisnya serta hubungannya berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat (jika data dari hasil wawancara) atau berdasarkan jenis kegiatan jika data tersebut berbentuk dokumen kegiatan.

4. Menyusun data dengan menempatkan data tersebut pada posisi pokok bahasan secara sistematis. Penyusunan dan pengumpulan data ini sesuai dengan alur analisis yang telah penulis susun dalam pembahasan dan penempatan serta penentuan volume data disesuaikan dengan yang dibutuhkan.

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena. Dalam penelitian ini, penulis sependapat dengan Anis dan Kandung (2014:64) yang menjelaskan bahwa metode yang dipilih untuk menganalisa data adalah metode analisa interaktif, yang mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*reduction data*) yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Jawaban yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan berdasarkan pertanyaan (dikelompokkan), jawaban yang sama dan yang berbeda dipisahkan, dan menentukan temanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*display data*) yaitu data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan dari hasil wawancara, diuraikan sesuai dengan reduksi yang telah dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan (*concluting drawing*) yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang ada kemudian diwujudkan dalam suatu kesimpulan yang bersifat tentative. Dengan bertambahnya data selama penelitian berlangsung, maka pada setiap kesimpulan dilakukan verifikasi secara terus menerus.

#### **J. Triangulasi Data Sebagai Metode Validasi Data**

Menurut Nasution (2006:114) triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi-metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi hasil penelitian.

Tujuan triangulasi data dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari

sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. Trianggulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber informasi, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Trianggulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan*. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata. Tetapi lebih penting lagi adalah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Profil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**

Secara historis, pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, adalah pengulangan bentuk pembagian wilayah Pemerintahan yang pernah ada dan berlaku sebelumnya yang dikenal sebagai pemerintahan *Afdeling* (Kabupaten) Ogan dan Komering Ulu pada tahun 1918 dengan Ibu Kota Muaradua yang kemudian dipindahkan ke Baturaja. Pada tahun 1947 daerah tersebut ditetapkan menjadi daerah otonom yaitu:

1. *Onder Afdeling* Ogan Komering Ulu dengan Ibukota Baturaja.
2. *Onder Afdeling* Komering Ulu dengan Ibukota Martapura.
3. *Onder Afdeling* Makakau dan Ranau dengan ibukotanya Muaradua

Pada tahun 1950 terjadi pembubaran negara bagian Sumatera Selatan melalui Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1950. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1959 kembali dibentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Ibukotanya Baturaja. Setelah 15 Tahun berjalan sistem pemerintahan mengalami perubahan yang sangat mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menghapuskan sistem pemerintahan Marga. Maka berdasarkan kedua UU tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ulu dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Pembantu Bupati, yaitu:

1. Pembantu Bupati Wilayah I (satu) Eks Kawedanan Baturaja dengan Ibukotanya Lubuk Batang.
2. Pembantu Bupati Wilayah II (dua) Eks Kawedanan Komerling Ulu dengan Ibukotanya Martapura.
3. Pembantu Bupati Wilayah III (tiga) Eks Kawedanan Muaradua dengan Ibukotanya Muaradua.

Didasari semangat reformasi, lahirlah komitmen masyarakat yang menghendaki pemekaran Kabupaten Ogan Komerling Ulu dengan pertimbangan untuk mempersingkat rentang kendali pelaksanaan pemerintahan, meningkatkan pelayanan, kemudahan pengawasan dan meningkatkan kemampuan daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta mempercepat proses pembangunan dalam rangka percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komerling Ulu menjadi 3 (tiga) Kabupaten mendapat dukungan dari Tokoh Masyarakat, Partai Politik dan berbagai elemen masyarakat Kabupaten Ogan Komerling Ulu.

Menyikapi hal itu, pada Tanggal 25 Mei Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu melalui surat Nomor 136/II/2001 mengusulakan rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komerling Ulu kepada DPRD Kabupaten Ogan Komerling Ulu. Selanjutnya DPRD Kabupaten Ogan Komerling Ulu menanggapi dengan mengeluarkan surat keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komerling Ulu Nomor 33 Tahun 2001, tanggal 13 Juli 2001 yang isinya menyetujui rencana pemekaran wilayah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.

Melalui surat keputusan Bupati Ogan Komerling Ulu Nomor : 125/10.A/SK/2001 dibentuk tim penyusunan rencana pemekaran Kabupaten Ogan

Komering Ulu, dan melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 670/SK/W/2001 Tanggal 13 Februari 2001, dibentuk tim peneliti rencana penetapan Kabupaten dan Kota Administratif menjadi Kotamadya dalam Propinsi Sumatera Selatan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka pada tanggal 15 Agustus Tahun 2001 dibentuk panitia pembantu persiapan pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ketua H.A.Rasyid Yusuf dan kawan-kawan.

Perjuangan Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (PPP-KOT). Panitia pembantu ini kemudian pada tanggal 6 Juli 2002 ditingkatkan menjadi Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (yang disingkat PPP-KOT) diketuai oleh Drs. Syahrir Oesman yang tugasnya antara lain mempersiapkan sarana dan prasarana, seperti lahan untuk perkantoran dan hal-hal yang diperlukan. Namun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu belum menunjukkan kepastian, sehingga seluruh elemen masyarakat termasuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabuapten Ogan Komering Ulu Timur (PPP-KOT) menyampaikan aspirasi secara terbuka di lapangan Ahmad Yani Baturaja.

Penyampaian aspirasi ini ternyata membawa dampak yang positif, yakni mendapat duklungan dari DPRD Propinsi Sumatera Selatan melalui surat keputusan DPRD Propinsi Sumatera Selatan nomor 10 tahun 2002 tanggal 23 Agustus 2002 yang isinya memberikan persetujuan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi 3 (tiga) Kabupaten.

Pada tanggal 19 sampai dengan 21 juli tahun 2002, DPR RI melalui komisi II beserta Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan Tim Departemen Dalam

Negeri melakukan kunjungan, survey dan evaluasi. Di daerah rencana pemekaran, sebagai klimaks perjuangan PPP-KOT dan seluruh elemen masyarakat membuahkan hasil yaitu dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ditetapkannya UU Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan. Tanggal 17 Januari 2004 Gubernur Sumatera Selatan melantik Drs. Amri Iskandar,MM sebagai pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan telah meletakkan kerangka awal dari penataan kelembagaan dan dimulai jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dilanjutkan oleh Drs.Sujiadi,MM sebagai pejabat Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang definitif.

Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang pertama kali, terpilih Herman Deru dan Kholid Mawardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang dilantik pada tanggal 23 Agustus 2005 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur. Selanjutnya lahirlah Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa tanggal 17 Januari adalah sebagai Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Seiring dengan perjalanan waktu yang ditandai berakhirnya masa jabatan Herman Deru dan Kholid Mawardi dari jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur pada priode kedua tahun 2010-2015 Selanjutnya, tampuk Pimpinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipercayakan Gubernur Sumsel kepada Richard Chahyadi AP, M.Si sebagai Penjabat Bupati Ogan

Komering Ulu Timur sampai dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur hasil Pilkada Tahun 2015. Berdasarkan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 yang di gelar KPU Ogan Komering Ulu Timur di Martapura tanggal 16 Desember 2015 menempatkan pasangan Kholid Mawarsi dan Ferry Antoni sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur terpilih Priode 2016-2021 dengan perolehan suara sebanyak 180.677 (58,55%) dari total jumlah suara sah 308.587 dengan jumlah pemilih di Ogan Komering Ulu Timur 330.679 mata pilih.

Pasangan HM Kholid Mawardi dan Ferry Antoni dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Priode 2016-2021 oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin pada tanggal 17 Februari 2016 di Palembang, bersamaan dengan pelantikan enam pasangan Bupati dan Wakil Bupati di Sumsel hasil Pilkada tahun 2015. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 3.370 km<sup>2</sup> dengan Ibukota Kabupaten ini terletak di Martapura yang didiami penduduk dengan beragam multi etnis suku dengan penduduk asli suku komering, kemudian ada suku Jawa, Ogan, Bali dan sejumlah suku lainnya yang ada di Nusantara meskipun demikian kehidup rukun penuh kekerabatan yang sangat kental.

Pada awal berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri dari atas 10 Kecamatan, 199 Desa dan 3 Kelurahan dan saat ini OKU Timur sudah ada 20 kecamatan, 305 desa, 7 kelurahan dan 20 desa persiapan. Secara historis pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur Ogan Komerling Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komerling Ulu adalah pengulangan bentuk pembagian wilayah Pemerintahan yang pernah ada dan berlaku sebelumnya yang dikenal sebagai pemerintahan *Afdeling* (Kabupaten) Ogan dan Komerling Ulu pada tahun 1918 dengan Ibu Kota Muaradua yang kemudian dipindahkan ke Baturaja.

Pada tahun 1947 daerah tersebut ditetapkan menjadi daerah otonom yang meliputi 3 *Onder Afdeling*, yaitu:

- a. *Onder Afdeling* Ogan Komerling Ulu dengan Ibukota Baturaja
- b. *Onder Afdeling* Komerling Ulu dengan Ibukota Martapura
- c. *Onder Afdeling* Makakau dan Ranau dengan ibukotanya Muaradua

Pada tahun 1950 terjadi pembubaran Nomor 11 Tahun 1950. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1959 kembali dibentuk Kabupaten Ogan Komerling Ulu dengan Ibukotanya Baturaja. Setelah 15 Tahun berjalan sistem pemerintahan mengalami perubahan yang sangat mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menghapuskan sistem pemerintahan Marga.

Didasari semangat reformasi, lahirlah komitmen masyarakat yang menghendaki pemekaran Kabupaten Ogan Komerling Ulu dengan pertimbangan untuk mempersingkat rentang kendali pelaksanaan pemerintahan meningkatkan pelayanan kemudahan pengawasan dan meningkatkan kemampuan daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam serta mempercepat proses pembangunan dalam rangka percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komerling Ulu menjadi 3 (tiga) kabupaten mendapat dukungan

dari Tokoh Masyarakat, Partai Politik dan berbagai elemen masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menyikapi hal itu pada tanggal 25 Mei Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui surat Nomor 136/II/2001 mengusulkan rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

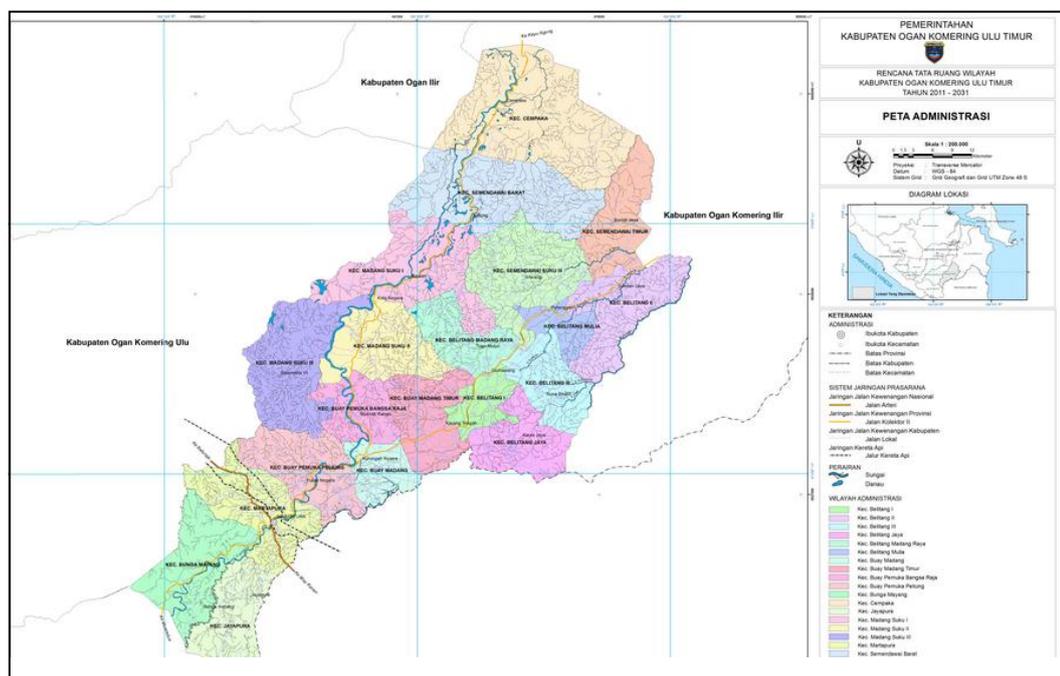
Selanjutnya DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu menanggapi dengan mengeluarkan surat keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2001 tanggal 13 Juli 2001 yang isinya menyetujui rencana pemekaran wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Melalui surat keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 125/10.A/SK/2001 dibentuk tim penyusunan rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu dan melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 670/SK/W/2001 tanggal 13 Februari 2001 dibentuk tim peneliti rencana penetapan Kabupaten dan Kota Administratif menjadi Kotamadya dalam Propinsi Sumatera Selatan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka pada tanggal 15 Agustus Tahun 2001 dibentuk panitia pembantu persiapan pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ketua H.A.Rasyid Yusuf dan kawan-kawan.

Panitia pembantu ini kemudian pada tanggal 6 Juli 2002 ditingkatkan menjadi Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (yang disingkat PPP-KOT) diketuai oleh Syahrir Oesman yang tugasnya antara lain mempersiapkan sarana dan prasarana seperti lahan untuk perkantoran dan hal-hal yang diperlukan. Melalui surat keputusan DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor 10 tahun 2002 tanggal 23 Agustus 2002 yang isinya memberikan

persetujuan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi 3 (tiga) Kabupaten.

Batas-batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Lubuk dan Lempuing, Ogan Komering Ilir.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan dan Simpang, Ogan Komering Ulu Selatan.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lengkiti, Sosoh Buay Rayap, Baturaja Timur dan Peninjauan (Ogan Komering Ulu) dan Muara Kuang (Ogan Komering Ilir).
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lempuing dan Mesuji (Ogan Komering Ilir).



Gambar 4.1  
Peta Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas

wilayah 3.370 km<sup>2</sup> dengan Ibukota Kabupaten ini terletak di Martapura yang didiami penduduk dengan beragam multi etnis suku dengan penduduk asli suku komering kemudian ada suku Jawa, Ogan, Bali, dan sejumlah suku lainnya yang ada di Nusantara meskipun demikian kehidupan rukun penuh kekerabatan yang sangat kental.

Tabel 7. Data Jumlah dan Komposisi Penduduk di Kabupaten OKU Timur.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Martapura	50.095	102,16	261
2	Bunga Mayang	16.481	113,54	85
3	Jaya Pura	12.103	230,17	76
4	Buay Pemuka Peliung	32.793	154,13	196
5	Buay Madang	37.133	114,36	460
6	Buay Madang Timur	55.617	156,25	390
7	Buay Pemuka Bangsa Raja	11.502	192,95	111
8	Madang Suku II	29.679	129,34	122
9	Madang Suku III	24.630	195,32	147
10	Madang Suku I	35.395	211,25	154
11	Belitang Madang Raya	42.491	163,59	617
12	Belitang I	52.557	354,50	283
13	Belitang Jaya	18.942	91,97	152
14	Belitang III	34.284	153,87	313
15	Belitang II	41.357	153,59	722
16	Belitang Mulya	20.659	45,97	156
17	Semendawai Suku III	38.335	297,77	176
18	Semendawai Timur	34.021	183,27	245
19	Cempaka	26.288	101,00	89
20	Semendawai Barat	20.338	225,00	51
<b>JUMLAH</b>		<b>634.700</b>		<b>186</b>

Sumber: BPS Kabupaten OKU Timur (2018)

Berdasarkan kondisi eksisting Jumlah Penduduk Kabupaten OKU Timur tercatat 634.700 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan di Kecamatan Buay Madang Timur yakni 55.617 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja dengan jumlah penduduk 11.502 jiwa saja dengan tingkat kepadatan 186 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani dapat dijelaskan dalam Tabel 8 sebagai berikut

Tabel 8. Data Jumlah Petani di Kabupaten OKU Timur.

No	Kecamatan	Petani		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Martapura	125	80	205
2	Bunga Mayang	26	21	47
3	Jaya Pura	28	19	47
4	B.P. Peliung	66	34	100
5	Buay Madang	61	44	105
6	Buay Madang Timur	34	24	58
7	B.P. Bangsa Raja	36	38	74
8	Madang Suku II	21	37	58
9	Madang Suku III	25	23	48
10	Madang Suku I	71	36	59
11	Belitang Mdg Raya	21	29	54
12	Belitang I	26	61	132
13	Belitang Jaya	15	22	43
14	Belitang III	26	24	50
15	Belitang II	15	28	43
16	Belitang Mulya	28	31	59
17	Semendawai Suku III	22	33	55
18	Semendawai Timur	26	21	47
19	Cempaka	95	88	183
20	Semendawai Barat	20	26	46
Jumlah		794	719	1.513

Sumber: BPS Kabupaten OKU Timur (2018)

## B. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering

### Ulu Timur

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang pangan dan tugas pembantuan, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan.

- b. Pelaksanaan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan.
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

## **2. Visi dan Misi**

### a. Visi

Menjadi Organisasi Pperangkat Daerah Produktif, Handal, Inovativ, Dan Aspiratif dalam Pemantapan Ketahanan Pangan.

### b. Misi

Untuk mencapai visi Dinas Ketahanan Pangan melakukan upaya mengembangkan misi selama tahun 2016-2021, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan.
- 2) Mengembangkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat.
- 3) Mengembangkan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat.
- 4) Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan serta penetapan dan evaluasi pelaksanaannya.
- 5) Mewujudkan kemandirian pangan.

### **3. Uraian Tugas**

#### **a. Kepala Dinas**

Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **b. Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya , dibantu oleh 2 (dua) sub bagian terdiri dari :

- 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- 2) Sub bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.

Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri dari :

- a) Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan.
- b) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan.
- c) Melakukan penyusunan anggaran.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan.
- e) Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- f) Melakukan pengelolaan data dan kerja sama. dan
- g) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sub bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha. Sub bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri dari :

- a) Melakukan pelaksanaan urusan keuangan.
- b) Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan.
- c) Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan.
- d) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara/Daerah.
- e) Melakukan penyusunan laporan keuangan.
- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran.
- g) Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- h) Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan.
- i) Melakukan urusan kepegawaian.
- j) Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan.
- k) Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik.
- l) Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip. Dan
- m) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

### **c. Bidang Ketersediaan Pangan**

Bidang Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya , dibantu oleh 2 (dua) seksi terdiri dari:

- a. Seksi Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan.
- b. Seksi Kerawanan Pangan.

Seksi Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan, penyediaan infrastruktur dan sumberdaya pangan.

Seksi Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri dari :

- 1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
- 2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
- 3) Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.

- 4) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
- 5) Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).
- 6) Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan.
- 7) Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan.
- 8) Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
- 9) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
- 10) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan. Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri dari :

- 1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan.
- 2) Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan.

- 3) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan.
- 4) Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan.
- 5) Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- 6) Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten.
- 7) Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan.
- 8) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan.
- 9) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

### **c. Bidang Konsumsi & Keamanan Pangan**

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya , dibantu oleh 2 (dua) seksi terdiri dari :

- a. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri dari :

- 1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan.
- 2) Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan.
- 3) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan.
- 4) Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun.
- 5) Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun.
- 6) Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga.
- 7) Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan.
- 8) Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan.
- 1) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar.
- 10) Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan.
- 11) Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD).
- 12) Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan.

- 13) Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan.
- 14) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan. dan
- 15) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri dari:

- 1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- 2) Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- 3) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- 4) Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal.

- 5) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu.
- 6) Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- 7) Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal.
- 8) Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan.
- 1) Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- 10) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- 11) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka diektahi bahwa Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang pangan dan tugas pembantuan yang telah ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

### **C. Data Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**

#### **1. Luas Lahan**

Berikut dijabarkan data luas lahan pertanian di Kabupaten OKU Timur.

Tabel 9. Data luas lahan pertanian di Kabupaten OKU Timur.

Tanaman Pertanian	Jumlah Lahan dan Hasil Pertanian			
	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata (ton/ha)
Padi Sawah	107.052,00	104.634,00	617.943,46	5,91
Padi Ladang	2.047,00	1.998,00	5.664,38	2,84
Jagung	1.483,00	1.478,00	7.149,32	4,84
Kacang Kedelai	241,00	228,00	256,30	1,12
Kacang Tanah	3.764,00	3.746,00	5.087,00	1,36
Kacang Hijau	426,00	417,00	521,07	1,25
Ubi Kayu	3.691,00	2.363,00	28.426,89	12,03
Ubi Jalar/Rambat	393,00	339,00	2.745,90	8,10
Sayur-sayuran	1.738,00	1.655,00	11.213,00	63,41
Buah-buahan	12.660,89	4.687,78	146.789,65	11,59

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Timur Tahun 2017

Tabel 7 menunjukkan bahwa luas lahan pertanian luas lahan pertanian di Kabupaten OKU Timur paling luas adalah untuk padi sawah dengan luas 107.052,00 ha, dengan luas panen 104.634,00 ha dan produksi sebesar 617.943,46 ton.

## 2. Kesejahteraan

Berikut dijabarkan data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Tabel 10. Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

No	Anggaran	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	a. Pajak Daerah	11.444.000.000	12.683.000000	16.422.000.000	14.913.961.076	14.643.458.568
	b. Retribusi daerah	5.489.000.000	8.229.000000	11.637.000000	12.462.859.039	3.678.485.750
	c. Bagian laba BUMD	3.401.000.000	3.583.000.000	4.728.000.000	4.489.489.933	3.989.489.933
	d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	4.489.489.933	3.989.489.933
	e. Penerimaan lain-lain	10.437.000000	6.019.000000	9.331.000.000	18.165.400.174	20.557.461.4213
2	Dana Perimbangan					
	a. Bagi hasil pajak	63.631.000.000	83.236.000.000	81.078.000.000	231.448.862.711	257.837.922.820
	b. Bagi hasil bukan pajak	71.481.000.000	97.178.000.000	157.468.000.000	-	-
	c. Dana Alokasi Umum	304.457.000.000	298.400.000.000	375.251.000.000	456.823.059.000	517.309.972.000
	d. Dana Alokasi Khusus	25.061.000.000	-	8.177.000.000	15.199.060.000	20.890.190.000
3	Pinjaman daerah	-	-	-	-	-
4	Bantuan/Hibah	25.201.000.000	0.916.000.000	85.498.000.000	-	-
5	Trasfer pemerintah pusat	-	-	17.720.000.000	-	-
6.	Tranfer pemerintah propinsi	-	-	21.079.000.000	-	-

No	Anggaran	2014	2015	2016	2017	2018
7.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	27.480.156.592	27.480.156.592
8.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	21.812.834.361	43.105.755.940
9.	Lain - lain				45.831.133.587	70.267.895.888
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>520.606.000.000</b>	<b>615.194.000.000</b>	<b>788.390.000.000</b>	<b>848.626.816.470</b>	<b>997.760.788.914</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (2018)

Tabel 8 menunjukkan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 masing-masing sebagai berikut, total realisasi pendapatan dari bagian pendapatan asli daerah sebesar Rp. 42,119 milyar. Selain itu, pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga berasal dari dana perimbangan sebesar Rp. 660,773 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 85,498 milyar. Sehingga total pendapatan kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2016 sebesar Rp. 788,390 milyar dan meningkat hingga tahun 2018.

### 3. Kemiskinan

Berikut dijabarkan data angka kemiskinan di Kabupaten OKU Timur.

Tabel 11. Data Angka Kemiskinan di Kabupaten OKU Timur Tahun 2012-2016

No	Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1	2012	56.510	8,98%
2	2013	65.410	10,28%
3	2014	65.250	10,13%
4	2015	72.840	11,24%
5	2016	73.930	11,29%

Sumber: BPS Kabupaten OKU Timur (2017).

Tabel 9 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten OKU Timur mengalami fluktuasi, dimana angka kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 56.510 (8,98%), sedangkan angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 73.930 (11,29%).

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Tahun 2017 belum efektif. Hal tersebut didasarkan pada temuan bahwa terdapat banyak instrumen penentu yang tidak terpenuhi, dari 11 instrumen hanya terdapat 3 yang terpenuhi sedangkan 8 instrumen lainnya tidak terpenuhi.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 antara lain kejelasan tujuan program sudah efektif. Efektivitas sasaran program sudah efektif. Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program sudah efektif yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Badan Statistik, dan BULOG Subdivre OKU. Oleh karena itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali kejelasan tujuan program, sasaran program dan unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program. Perlu ada kontrol kebijakan pemerintah Kabupaten OKU Timur dalam menjaga stabilitas ketersediaan beras, sehingga ketahanan pangan untuk konsumsi beras di wilayah Kabupaten OKU Timur dapat terjaga.

2. Faktor penghambat kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 antara lain:
  - a. Kejelasan strategi pencapaian tujuan program belum efektif dan belum ada tindak lanjutnya
  - b. Perumusan kebijakan program yang belum mantap dan kurang berpihak pada petani
  - c. Penyusunan program yang kurang tepat dan perlu penyempurnaan
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana kurang lengkap dan jikapun ada masih minim
  - e. Operasional program belum efektif, masih banyak kendala dan kekurangannya
  - f. Fungsional program belum efektif dilaksanakan dan perlu peningkatan dalam kerjasama dengan kelompok tani, gapoktan dan lumbung
  - g. Tujuan program belum efektif dimana kesejahteraan petani belum tercapai secara maksimal.
  - h. Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program dan harus ada penambahan SDM pelaksana.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diberikan saran yaitu:

1. Perlu adanya perbaikan pada kejelasan strategi pencapaian tujuan program, perumusan kebijakan program yang mantap, penyusunan program, penyediaan sarana dan prasarana, operasional program, fungsional program, tujuan program dan efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan

program. Sehingga pada tingkat petani diperlukan adanya penguatan dan pemanfaatan lembaga kelompok tani yang sudah terbentuk, menyangkut kegiatan produksi dan kegiatan penjualan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar. Hal ini diharapkan peningkatan harga jual petani terutama pada musim panen raya.

2. Kerjasama antara petani dan penggilingan perlu ditinjau kembali mengingat keterikatan petani dengan penggilingan menyangkut sistem pinjaman dan sistem pembelian yang kurang menguntungkan petani. Sistem pemasaran yang baik akan menciptakan keadilan harga baik dari lembaga pemasaran, petani dan konsumen pada akhirnya, oleh karena itu perlu keterlibatan langsung dari Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan dalam pengawasan kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afifuddin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (2nd Ed.). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anis, Fuad dan Kandung. Sapto Nugroho, 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS*, Jakarta.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode penelitian Ilmu Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* . Prenada Media Group, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Daniel, Goleman. 2012. *Ecological Intelligence (Mengungkap Rahasia Di Balik Produk-Produk yang Kita Beli)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, Bandung: Pustaka Setia.
- Darwin, Moh. 1993. *Analisa Kebijakan Sosial*. Yogyakarta: UGM.
- Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Easton, David. 2003. *The Political System: An Inquiry into the State of Political. (alih bahasa), Kerangka Kerja Analisa Sistem. Politik*. Jakarta: Bina Pustaka.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- Friedlander, Walter. 2010. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Gema Insani.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.

- Kotler, Phillip. 2010. *Marketing Management Edisi 14*. Global Edition. Pearson: Prentice Hall.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, Kartodirdjo. 2012. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin, H. dan Fadillah, P. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Mursyid, M. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution, Arman Hakim. 2006. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito: Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Nuryani, Nia. 2007. *Kajian Ketahanan Keluarga Petani*. Bandung: Alfabeta.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Prawirosentono, Suyadi. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Rahardi, Aristo. 2003. *Cerdas Beragrobisnis Mengubah Peritangan Menjadi Peluang Berinvestasi*. Jakarta: Agro Media Pustaka.
- Rahim, Abdul. 2007. *Ekonomika Pertanian, Pengantar Teori dan Kasus*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Saladin, Djaslim. 2006. *Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*, Cetakan Ketiga. Bandung: Linda Karya.
- Sirait, Alfonsus. 1991. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sukoco, Dwi Heru. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Jogjakarta: Gita Pustaka.
- Suratiyah, Ken. 2006. *Ilmu Usahatani*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Susanto, 1975. *Pendapat Umum*. Bandung: Bina Cipta.
- Sutjipta, Kusnadi. 2016. *Perangkat kemiskinan problema dan strategi pengentasannya dalam pembangunan*. Jakarta: Aditya Media.
- Syafie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Eresco.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. JogJakarta: Lukman Offset.
- Widodo, Joko. 2001. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Pustaka Pelajar.

## **Jurnal**

- Damanhuri, Didin S. 2010. *Akar Problematik Ekonomi Politik Pertanian Dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Jurnal Penelitian. hlm. 2-4.
- Fitri, Alissha. 2018. *Pengaruh Pengurangan Impor Beras Pakistan Terhadap Petani Beras Indonesia*. Jurnal Penelitian. hlm. 1-8.
- Linawarti, Agistari. 2015. *Analisis Saluran Tataniaga Beras di Wilayah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*. Jurnal Penelitian. hlm. 3-5.
- Nasution, Lokot Zein. 2016 *Reposisi Peran Dan Fungsi Bulog Dalam Tata Niaga Pangan*. Jurnal Penelitian. hlm. 1-2.
- SMERU, 2012, *Penggunaan Pertanian Pada Era Otonomi Daerah*, Jakarta.

## **Skripsi**

- Fatkhullah. Mukhammad, 2016. *Petani dan Kemiskinan (Kajian Konsep Kesejahteraan dalam Konteks Perubahan Sosial pada Komunitas Petani)*, Paper Perubahan Sosial. Jurusan Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. hlm. 2-3.

Prima Sari Esti Eysa. 2011. *Analisis tataniaga gabah/beras dari Kenagarian Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok*, Jurnal Penelitian, hlm. 3-7.

Rambe. Fauzi. 2008. *Analisis Alokasi Pengeluaran dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Studi di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)*. Jurnal. Vol. 1 No. 1/Januari 2008. hlm. 16-28.

### **Dokumen-Dokumen**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 2018.

### **Peraturan Perundangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( alinea keempat).

Pemerintah Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Perdagangan No 27 / M-Dag/5/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras.

Pemerintah Kota . 2017. Peraturan Bupati OKU Timur No 1 Tahun 2017, tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Ketahanan Pangan.

### **Rujukan Elektronik**

Atjo, M. Achsan Atjo, *Sawah Irigasi OKU Timur, Secerach Asa LTT Sumsel di tengah Paceklik*, <http://www.berita2bahasa.com/berita/08/18582408-sawah-irigasi-oku-timur-secerach-asa-ltt-sumsel-di-tengah-paceklik>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2018 Pukul 08.15 WIB

Evan Hendra, 2018, *Harga Beras di Kabupaten OKU Timur Terus Turun*, Artikel Pertanian <http://palembang.tribunnews.com/2018/03/06/mamasuki-masa-panen-harga-beras-di-kabupaten-oku-timur-terus-turun>, diakses pada Tanggal 4 Januari 2019 Pukul 08.20 WIB

<http://www.okutimurkab.go.id>, diakses pada Tanggal 28 Agustus 2018 Pukul 20.18 WIB

<http://www.okutimurkab.go.id/pertanian.html> (Diakses pada Tanggal 28 Agustus 2018 Pukul 20.18 WIB)

<https://okutimurkab.bps.go.id/> Diakses pada Tanggal 29 Agustus 2018 Pukul 20.35 WIB)